

Implementasi Program Bantuan Bedah Rumah Studi Di Desa Mogoyungung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow

Anggi Verelins Tumundo

Florence D.J Lengkong

Helly F. Kolondam

Tumundoanggi72@gmail.com

Abstract

A decent house to live in is one of the needs of every community, especially people who do not have a decent house to live in. Therefore, the government issued a Home Surgery Assistance program. Mogoyungung Village, Dumoga Timur District Bolaang Mongondow Regency, is one of those who have implemented this assistance program. This research was conducted in order to find out the process of implementing the Home Surgery Assistance Program Policy in Mogoyungung Village, Dumoga Timur District. This research uses a qualitative descriptive research type. Where the purpose of this study is to find out how the process of implementing the Home Surgery Assistance Program policy in Mogoyungung Village, Dumoga Timur District. The research focus is based on the policy implementation model by Van Meter and Van Horn in Subarsono (2005:95) where there are several variables that are used as the core of the research focus, there are 6 variables, namely as follows: Policy Standards and Targets, Resources, Inter-Organizational Relations, Characteristics of Implementing Agencies, Social, Economic and Political Conditions, Implementor Disposition. The data collection techniques used are as follows: Observation, Interview, Documentation. The informants in this study were 14 people from the community. This aid program has been running well because it can be seen that the distribution has been right on target, although there are people who are still late in building houses and feel that funds are still lacking. However, this house renovation assistance is one of the useful aids to meet the needs of the community.

Keywords: Implementation, Program, Assistance, House Renovation

PENDAHULUAN

Program bantuan bedah rumah adalah salah satu program yang di buat pemerintah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga yang termasuk kurang mampu guna untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan terhadap masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan program bedah rumah ini harus dilaksanakan sesuai peraturan serta kebijakan yang telah di tetapkan. Dengan adanya

kebijakan yang baru di keluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan Skema bantuan bedah rumah atau di kenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman tentunya juga harus disesuaikan dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2011. Undang –undang ini juga menjelaskan tentang peran

pemerintah yang sebagai regulator kini menjadi stimulator dan fasilitator dalam penyelenggaraan perumahan umum, aktor pembangunan rumah negara dan rumah khusus, penyediaan tanah bahkan sarana prasarana dan fasilitas umum. Karena permukiman atau perumahan tentunya adalah sebagai salah satu dari kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat agar terjadinya peningkatan kualitas hidup karena melalui pembangunan bedah rumah disitu tercipta suatu rumah atau tempat tinggal yang sehat dan layak untuk dihuni oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut. Karena rumah yang layak huni ini adalah merupakan salah satu wadah di dalam pengembangan sumber daya masyarakat sendiri. Tujuan Program bedah rumah ini yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat untuk memperbaiki rumah dari masyarakat melalui upaya dalam penyempurnaan peraturan pembangunan perumahan. Program pembangunan bedah rumah atau Bantuan stimulan perumahan swadaya adalah suatu program yang dari pemerintah agar masyarakat yang kurang mampu dapat jugalah tinggal di tempat atau

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Meyer Imanuel, Florence Daicy Lengkong, Alden Laloma (2018). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Minahasa Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari (1) ukuran dan tujuan kebijakan sejauh ini tujuan.. (2) sumber daya kebijakan ini terdapat beberapa masalah yaitu kurangnya tingkat produktifitas kinerja pegawai dalam layanan di kantor.(3) ciri-ciri atau sifat badan instansi pelaksanaan adalah bagaimana cara pihak dari dinas sebagai

rumah yang layak, agar dimana masyarakat mendapat rasa nyaman dan terlindungi. dari kotoran ataupun bahan buangan yang berbahaya.

Desa Mogoyunggung adalah salah satu desa yang telah merealisasikan atau menjalankan program bedah rumah tersebut. Dikatakan langsung oleh pemerintah desa mogoyunggung Bedah rumah ini merupakan salah satu bantuan stimulan dalam hal untuk memperbaiki bahkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat agar supaya juga terjadinya peningkatan kualitas tempat tinggal atau rumah agar bisa dihuni dengan baik atau layak agar terciptanya lingkungan yang sehat dan aman agar masyarakat terhindar atau mencegah terjadinya suatu hal yang membahayakan atau yang tidak diinginkan. Tujuan dari pemerintah juga adalah dalam hal pemberdayaan agar terciptanya kemandirian dari masyarakat agar masyarakat mampu dalam hal membangun juga meningkatkan kualitas perumahan supaya bagus atau layak dihuni oleh masyarakat tersebut.

implementor dalam menjalankan kebijakan sesuai aturan. (4) Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana hal ini sudah berjalan dengan efisien namun juga masih perlu adanya komunikasi bersama pihak kementerian dalam hal penambahan kuota penerima bantuan.

Efipania Dirangga, Florence D.J. Lengkong, Helly Kolondam (2021) penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) di Pulau Marapit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Daerah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) di Pulau Marapit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari pembahasan

adalah dengan menggunakan pengertian yang dikemukakan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn yang mengatakan yaitu keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yakni: standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, sikap para pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi – organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Michelle E L Kembuan, Florence D.J. Lengkong, Very Londa (2018). Tentang Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir di Kecamatan Tikala Kota Manado. Tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk penelitian ini peneliti memakai model implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn yaitu implementasi kebijakan dilihat dari enam variabel. (1) komunikasi sesuai jadi yang dimaksudkan adalah komunikasi yang dibuat oleh pemerintah atau kepala lingkungan terhadap masyarakat masi kurang sehingga perlunya ada peningkatan. Sumber daya, ternyata masi kurang memadai bahwa kurangnya sumber daya manusia terhadap implementasi kebijakan bisa mempengaruhi implementasi bahkan kinerja terhadap kebijakan tersebut. Lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian yang suda dilakukan ini menerangkan yaitu aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik suda berjalan baik.

Konsep Teori

Pengertian Impementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan. Implementasi ini dikaitkan dengan hal berkegiatan yang dilaksanakan dan mencapai suatu tujuan. Menurut Van dan Horn (1975) mendefinisikan implementasi lebih spesifik yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh publik atau swasta (kelompok) yang diarahkan pada pencapaian

tujuan yang ditetpka pada tujuan sebelumnya. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang penting dalam pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah biasanya terbentuk sebuah program tersebut dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahapan implementasi kebijakan dapat diartikan pula sebagai tindakan nyata dan kongrit yang dilakukan oleh pemerintah hasil dari rumusan yang telah dibuat dalam tahapan formulasi. Dalam prakteknya dilapangan, implementasi kebijakan bisa saja mempengaruhi para objek yang menjadi sasaran dalam pelaksanaannya. Sehingga harapan dari pengaruh tersebut adalah dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat terutama menyangkut masalah kesejahteraan. Studi mengenai implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah selanjutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut tercapai tujuannya. Implementasi adalah sebuah hal yang penting dalam proses perwujudan gagasan. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas ,aksi,tindakan, atau adanya suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tapi juga suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan. Menurut Riplay dan Frangklin (2012:148) dikatakan bahwa Implementasi adalah setelah undang – undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Fungsi Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah proses bagaimana mentranformasikan input atau tujuan dan isi kebijakan ke dalam bentuk rangkaian tindakan oprasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan oleh kebijakan tersebut .Fungsi dari implementasi

adalah mentrasformasikan tujuan-tujuan kebijakan kedalam bentuk –bentuk kegiatan oprasional yang dibutuhkan agar kebijakan mencapai tujuannya.

Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam teorinya ini berawal dari suatu asumsi bahwa proses implementasi akan berbeda-beda sesuai dengan sifat kebijakan yang dilaksanakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn menawarkan karakteristik dalam proses implementasi yakni, pertama proses implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kedua, proses implementasi akan dipengaruhi oleh sejumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Sementara itu model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:95) menetapkan beberapa variabel yang diyakini berkaitan dengan implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1 Standar Dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2 Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human resources). Sumber daya dapat menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.

3. Hubungan Antar Organisasi Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antara instansi bagi keberhasilan suatu program dalam mencapai sasaran dan tujuan program.

4. Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah yang mencakup pada struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi di dalam suatu program.

5. Kondisi Sosial, Politik Dan Ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi Dimana, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejahtera mana kelompok-kelompok kepentingan yang memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Ini dapat juga menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi pada kebijakan itu sendiri.

6. Disposisi Implementor

Dalam disposisi Implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni : respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Ini menunjuk bahwa sikap para pelaksana menjadi variabel penting dalam proses implementasi kebijakan.

Tujuan Implementasi

Menurut Wibawa (Tahir, 2014:58) Tujuan implementasi yaitu untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Tujuan yang paling utama dalam implementasi yakni untuk melaksanakan rencana yang sudah di susun dengan baik, cermat oleh kelompok ataupun individu. Tujuan kedua yaitu agar bisa menguji dan mendokumentasi suatu prosedur di dalam penerapan suatu rencana serta kebijakan.

Contoh – contoh implementasi

Dibawah ini merupakan beberapa contoh implementasi sebagai berikut:

1. Implementasi nilai pancasila, pancasila adalah suatu dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu terdapat nilai-nilai luhur yang harus kita terapkan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga pancasila itu menjadi suatu pedoman bagi masyarakat indonesia serta juga menjadi pandangan hidup dan moral. Nilai-nilai pancasila harus di implementasikan atau di terapkan bagi semua masyarakat indonesia guna tujuan bangsa dan negara bisa tercapai. Beberapa bentuk implementasi nilai-nilai pancasila yaitu: menjaga kebersihan lingkungan dengan bergotong royong atau kerja bakti, menjaga ketertiban bermasyarakat, serta saling membantu.
2. Implementasi kebijakan publik, dimana pemerintah sudah mempertimbangkan setiap kali membuat kebijakan publik. Contohnya seperti kebijakan dibidang pendidikan yaitu: pergantian kurikulum agar pendidikan lebih maju, pemberian bantuan disekolah, serta juga pendidikan karakter agar mempunyai moral yang baik.

Jenis-jenis implementasi

Ada beberapa jenis implementasi antara lain:

1. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu tahapan administrasi yang telah dilakukan setelah kebijakan atau sebuah

aturan hukum ditetapkan atau di setuju dengan mengikuti proses politik.

2. Implementasi sistem yaitu sebuah proses untuk menempatkan informasi yang baru ke operasi.

3. Implementasi strategi adalah proses menerapkan strategi yang telah dibuat sebagai bentuk tindakan dengan banyak prosedur, program, dan anggaran.

Pengertian Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan. Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran. Dalam proses pembelajaran secara lebih luas desain/perencanaan dapat diartikan :

1. Suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Suatu cara bagaimana mencapai tujuan dengan sebaik - baiknya
3. Penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, kapan waktunya, dan oleh siapa.

Program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa : Program adalah instrumen kebijakan yang

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Dalam suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat mata pencarian atau mempunyai mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

1. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti raskin.
2. Tidak memiliki aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang tempati.
3. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau ada surat keterangan kepemilikan dari Kelurahan/ Desa atas status tanah.
4. Rumah yang dimiliki dan ditinggali adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan social.

Bedah Rumah

Pemerintah memberikan satu kemudahan bagi masyarakat yakni dengan memperoleh rumah yang layak huni melalui program bantuan bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dimana program bantuan bedah rumah ini adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Permukiman Rakyat (PUPR). Sesuai dengan aturan dalam aturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan perumahan swadaya. pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran

METODE PENELITIAN

Model penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dokumen resmi lainnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami, mencari makna di balik data, untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran sensual, empiris logis.

Di dalam penelitian ini yang dijadikan segi informan ialah berjumlah 13 orang

1. Aparat desa 3 orang
2. Masyarakat 7 orang
3. Tim pelaksana 3 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program bantuan bedah rumah adalah salah satu program bantuan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah. Program ini tentunya harus dilaksanakan dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan segala kebijakan yang telah ditetapkan. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya program bantuan ini. Maka penulis menggunakan 6 variabel yang dapat dijadikan inti dari komponen implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:95), yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan yaitu harus jelas dan terukur sehingga dapat realisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen implementasi. Standar dan sasaran yang ditemui dilihat dari hasil penelitian dimana pemerintah dan tim pelaksana sudah membagikan atau menyalurkan program bantuan ini kepada masyarakat sesuai dengan Standar dan kebijakan yang berlaku dimana segala kebijakan tersebut di atur

dalam peraturan menteri Nomor 07/PRT/2018.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber daya dapat merujuk pada sumber finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Berdasarkan data yang ditemui dilapangan adalah sumberdaya didalamnya ada dana bantuan yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan masyarakat tersebut mendapatkan dana sebesar RP. 20.000.000 dengan perincian 17.500.000 adalah bahan material yang dapat diambil pada bagian penyalur yang berada didesa Ibolian dan sisanya 2.500.000 adalah sebagai upah tukang dalam proses pembuatan

3. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu banyak dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antara instansi bagi keberhasilan suatu program dalam mencapai sasaran dan tujuan program. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa pemerintah memang tidak melakukan sosialisasi mengenai program ini kepada seluruh masyarakat melainkan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat calon penerima yang di anggap layak untuk mendapatkan bantuan tersebut dengan cara mengunjungi.

4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah yang mencakup pada struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi di dalam suatu program.

Dilihat dari karakteristik agen pelaksana menurut hasil penelitian atau data yang telah didapatkan adalah yang terkait dengan pihak-pihak yang tergabung dalam program ini yaitu mencakup Pemerintah desa, pelaksana/pendamping, masyarakat penerima dan juga kementerian PUPR yang telah mengeluarkan program tersebut dianggap sudah melakukan masing-masing tugas sebagaimana mestinya.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi Dimana, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Ini dapat juga menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi. Sesuai dengan data yang ditemui dilapangan bahwa kondisi lingkungan dari masyarakat penerima bantuan ini sudah terlihat baik dan bagus dikarenakan sudah memiliki rumah yang layak untuk dihuni dan masyarakat tersebut merasa nyaman dalam bertempat tinggal.

6. Disposisi Implementor

Dalam disposisi Implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni :respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Ini menunjuk bahwa sikap para pelaksana menjadi variabel penting dalam proses implementasi kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dengan rumusan masalah bagaimana proses implementasi program Bantuan Bedah Rumah Studi di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan yakni pemerintah dan tim pelaksana sudah membagikan atau menyalurkan program bantuan ini kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). sesuai dengan Standar dan kebijakan yang berlaku dimana segala kebijakan tersebut di atur dalam peraturan menteri Nomor 07/PRT/2018. sehingga pemerintah sangat merasa senang karena program ini dapat sesuai dan tepat sasaran mengikuti segala aturan yang berlaku. Dengan mengingat jika tidak menjalankan program dengan sebagaimana mestinya nanti para pemerintah desa bisa mendapat peringatan seperti tahun yang lalu dan tidak mendapat lagi kesempatan maka dari itu pemerintah sangat selektif dalam halnya memilih calon penerima. Tujuan dari pemerintah yakni membuat masyarakat merasa nyaman dengan bertempat tinggal yang baik.
2. Sumber daya didalamnya ada sumber dana bantuan yang didapatkan oleh masyarakat penerima dan bantuan sebesar RP. 20.000.000 dimana 17.500.000 sebagai bahan material dalam proses pembuatan rumah bantuan dan sisanya 2.500.000 sebagai upah dari tukang dimana masyarakat penerima menerima bantuan ini di supplier tertentu. Dan masyarakat mengerjakan rumah selama kurun waktu 6 bulan ada juga diantara masyarakat mengikuti mapalus ada juga yang tidak. Berbicara mengenai bahan yang didapatkan cukup baik untuk digunakan.
3. Hubungan antar organisasi dimana hubungan masyarakat dengan pemerintah

dan juga tim pelaksana program bantuan ini memiliki hubungan yang baik dimana dengan adanya kunjungan langsung dari tim dalam proses menyakinkan masyarakat agar mau mengikuti pogram tersebut karena masyarakat dirasa layak untuk mendapat bantuan ini menurut tim dan pemerintah. Memang ada masyarakat yang sulit melengkapi segala tuntutan, namun pemerintah selalu mengupayakan kecuali memang masyarakat belum mempunyai lahan.

4. Karakteristik agen pelaksana terkait dengan agen pelaksanaan program ini adalah Aparat Tim program, masyarakat dan juga PUPR yang mengeluarkan program dan dibagikan ke kabupaten sampai pelosok desa. Dalam proses tahapan pembagunan tim pelaksana ata pendamping tetap melaukan monitoring atau pengawasan kepada pihak masyarakat yang menjadi penerima bantuan dilihat mereka mampu mengawasi dengan baik.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan poltikdi desa mogoyunggung menimbulkan suatu kondisi sosial yang positif dikarenakan masyarakat sudah banyak yang membuat rumah bantuan sehingga dilihat dari lingkungan yang sudah nampak bersih dan sehat. Walaupun ada beberapa masyarakat yang masih belum berhak mendapatkan program bantuan ini dilihat dari aspek ekonomi sehingga ada masyarakat yang belum menyelesaikan tahapan pembanguanan atau belum rampung ada juga masyarakat yang tidak mempunyai kendala berarti kecuali yang tidak menyelesaikan pembangunan bantuan tersebut.
6. Disposisi implementor Pemerintah melihat dan mencari kriteria seorang penerima dengan adil dan sesuai dimana program ini sudah direalisasikan kepada yang membutuhkan sehingga ada banyak harapan masyarakat tetang kelangsungan program ini agar nantinya juga program

tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan baik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan saran dalam bentuk mengimplementasikan Program Bantuan Bedah Rumah Studi di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow secara baik maka disarankan:

1. Diharapkan pada pemerintah dan juga tim pelaksana program bantuan ini agar lebih meningkatkan lagi proses penyelenggaraan secara langsung misalnya sosialisasi di balai desa agar dimana masyarakat semua dapat dengar dan mengerti akan program bedah rumah atau BSPS tersebut.
2. Harus ada juga kesadaran masyarakat penerima bantuan bedah rumah ini agar dapat saling membantu bergotong royong
3. Harus ada peningkatan mengenai dana bantuan karena dana bantuan masih dirasa belum memadai atau mencukupi bagi masyarakat penerima yang lain.
4. Diharapkan juga masyarakat penerima harus benar-benar siap dalam mengikuti program agar program bisa berjalan dengan baik dan pembangunan rumah bisa diselesaikan secara rampung
5. Diharapkan kepada tim pelaksana program agar lebih lagi menjalankan program sebagaimana dengan tugas dan tanggung jawab dimana tim pelaksana harus lebih tegas dalam hal mengarahkan masyarakat penerima. Agar program bantuan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, R. (2019), Implementasi kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Koto Tuo Kecamatan XII Koto kampar kabupaten kampar.2019
- Aziz A, huamaizi (2013). Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang kegiatan Pusat Informasi pada dinas

komunikasi dan informatika provinsi sumatera utara.

- Cahyani, D.(2019) Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah di Kota Bandar Lampung. 2019.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter, 1975, Model-model dalam Kebijakan Implementasi, Yogyakarta
- Edward Goerge III,1980 Administrasi Publik, Bandung, Mutiara
- Dirangga E, Lengkong F.D.J, Kolondam H(2021) penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Daerah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) di Pulau Marapit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi Negara Universitas Sam Ratulangi Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Kembuan M.E, Lengkong F.D.J, Londa V.Y (2018). Tentang Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir di Kecamatan Tikala Kota Manado. Jurnal Administrasi Negara Universitas Sam Ratulangi Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Meyer, Imanuel , Lengkong F.D.J dan Laloma A. (2018) mengenai Implementasi kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya di kabupaten minahasa selatan. Jurnal Administrasi Negara Universitas Sam Ratulangi Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Ripley, Randall B dan Grace A. Fraklin. (2012:148), Policy Implementation and Bureaucracy, Chicago:The Dorsey Press
- Sinambela, L. P.2011. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta Bumi Aksara

Suratman (2017). Generasi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Capiya Publishing.

Sugiyono,

Memahami penelitian kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2014

Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS

Widodo, J. 2018. Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Kreatif

Zulkarnain. 2017 Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan.

Sumber Lain :

Peraturan menteri PUPR nomor 07/PRT/M/2018

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.